

PENGUKURAN EDUCATION FOR ALL DEVELOPMENT INDEX (EDI) INDONESIA TAHUN 2011-2015

Ahmad

Universitas Gajayana Malang
ahmad_t@unigamalang.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui capaian *Education For All Development Index* (EDI) Indonesia Tahun 2011-2015. Kajian studi kepustakaan yang digunakan sebagai metode dalam kajian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa hasil Laporan EDI 34 Provinsi, dan Laporan PDSPK dan hasil publikasi yang relevan dengan kajian berbasis online, dengan tahapan review kepustakaan, analisis laporan-laporan, melakukan dialog dengan para akademisi, praktisi, dan pihak pemilik program EDI dalam hal ini stakeholders di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas Jakarta. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: 1) Rata-rata capaian EDI tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,963; 2) Rata-rata Indeks APM SD/MI Indonesia sampai tahun 2015 adalah sebesar 0.973; 3) Rata-rata Angka Melek Huruf Usia 15 tahun keatas (AMH15+) tahun 2011-2015 adalah sebesar 0.96; 4) Rata-rata ISG nasional sejak tahun 2011-2015 telah mencapai 0,966., dan 5) Rata-rata Angka Bertahan Kelas 5 SD nasional tahun 2011-2015 telah mencapai 0.954. Secara umum capaian EDI nasional tahun 2011-2015 berhasil dengan predikat sangat tinggi hal ini berdampak pada kepercayaan Internasional bahwa Indonesia konsen dan serius dalam menyelenggarakan program pendidikan untuk semua dalam menciptakan pendidikan global yang berkualitas, dan bertanggungjawab.

Kata kunci: *Education For All Development Index, AMH15+,Angka Melek Huruf*

PENDAHULUAN

Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia nasional merupakan prioritas utama bangsa Indonesia, apalagi dewasa ini Indonesia bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada tahun 2010 populasi penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, dan meningkat menjadi 245,4 juta jiwa tahun 2014, bahkan diproyeksikan terus mengalami peningkatan sebesar 305,6 juta jiwa pada tahun 2035.(Pusat Data Statistik Pendidikan: 2014: 13),surplus demografi Indonesia tersebut memberi pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia, bila Indonesia dijadikan sasaran pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya peningkatan 28,6% dari 237,6 juta penduduk tersebut secara langsung berdampak pada sektor pendidikan. Ini menjadi peringatan bahwa apabila pembangunan pada bidang pendidikan tidak dikelola dengan benar dan penuh

tanggungjawab maka akan menjadi bencana, yang muaranya akan melonjaknya angka pengangguran, menipisnya sumber daya alam bahkan terbatasnya peluang kerja yang bermuara pada merosotnya pembangunan manusia Indonesia.

Terkait dengan itu berbagai kesepakatan Internasional tentang pendidikan telah ditandatangani. Salah satu diantaranya melalui Deklarasi Dakar yang ditandatangani di Dakar, Senegal, tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*) sejak tahun 2000 sampai 2015 yang memiliki 6 (enam) program prioritas antara lain: (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Program Pendidikan Dasar; (3) Program Pendidikan Kecakapan Hidup; (4) Program Pendidikan Keaksaraan; (5) Program Pengarusutamaan Gender; dan (6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Unesco: 2000). Enam program komitmen universal tersebut menjadi landasan gerak dalam pengembangan pembangunan masyarakat

dunia. Akan tetapi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan ke-enam program tersebut dapat diukur dengan instrumen yang disebut *Education for all Development Index* (EDI).

EDI adalah indeks yang dikembangkan oleh UNESCO untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan program *Education For All* di suatu negara anggota PUS. Adapun komponen EDI berupa pendidikan dasar, keaksaraan orang dewasa, pengarusutamaan gender, dan mutu pendidikan. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur setiap komponen EDI tersebut berupa APM usia 7-12 Tahun (*Primary Net Enrolment Ratio*), AMH Dewasa (*Adult Literacy*), Indeks Spesifik Gender (*Gender Specific Index*), dan AB (Angka Bertahan) sampai tingkat 5 (*Survival Rate to Grade 5*). Untuk mengukur ketercapaian program pendidikan dasar dilihat dari ketercapaian angka partisipasi murni (APM) usia 7-12 tahun. Pendidikan dasar mencakup seluruh akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dan kemampuan menyelesaikan program tersebut. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase pencapaian angka partisipasi murni usia 7-12 tahun (APM usia 7-12). Variasi nilai APM berkisar antara 0-100 persen. Angka 100 persen berarti seluruh anak usia 7-12 tahun terdaftar sebagai siswa di sekolah, walaupun kemudian tidak semuanya menamatkan sekolahnya.

Untuk ketercapaian program keaksaraan orang dewasa dilihat dari angka melek huruf (AMH) usia 15+. Metodologi pengukuran AMH 15+ didasarkan pada hasil program keaksaraan yang didefinisikan sebagai keterampilan yang berproses dan berkelanjutan. Angka melek huruf digunakan sebagai indikator keaksaraan orang dewasa yang terbaik dan tersedia saat ini. Untuk mengukur paritas dan kesetaraan gender dilihat dari indeks spesifik gender (ISG). Komponen Indeks Spesifik Gender diukur dengan indeks komposit spesifik gender atau the gender specific EFA indeks (GEI). Idealnya, GEI mencerminkan keseluruhan program EFA/PUS yang bertujuan untuk mengurangi disparitas gender di SD/MI dan SMP/MTs. Keberhasilan paritas gender

dilihat dari pencapaian kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki di SD/MI dan SMP/MTs, dan kesetaraan gender (memastikan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan). Pencapaian kesetaraan gender diukur dengan indeks paritas gender (GPIs) dari angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

Untuk mengukur mutu pendidikan dilihat dari indikator angka bertahan sampai tingkat 5 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Konsep kualitas pendidikan telah menjadi perdebatan. Indikator yang digunakan diantaranya adalah dengan mengukur perolehan hasil belajar pada siswa.

Diakui bahwa pengukuran prestasi belajar belum optimal, karena terbatas pada keterampilan dasar (membaca, berhitung, dan sains) tidak termasuk nilai, kemampuan afeksi, dan keterampilan non-kognitif lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di semua negara adalah angka bertahan kelas 5 SD/MI. Angka bertahan sampai kelas 5 adalah semua siswa SD/MI yang bertahan sampai tingkat 5.

Klasifikasi EDI berdasarkan kriteria UNESCO bahwa EDI suatu negara dikategorikan tinggi apabila $EDI \geq 0.95$, Sedang $0.80 \leq EDI < 0.95$, dan Rendah $EDI < 0.8$. Penelitian ini sangat menunjang peningkatan mutu pendidikan nasional, lebih-lebih peningkatan kualitas dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dan Informal di Indonesia.

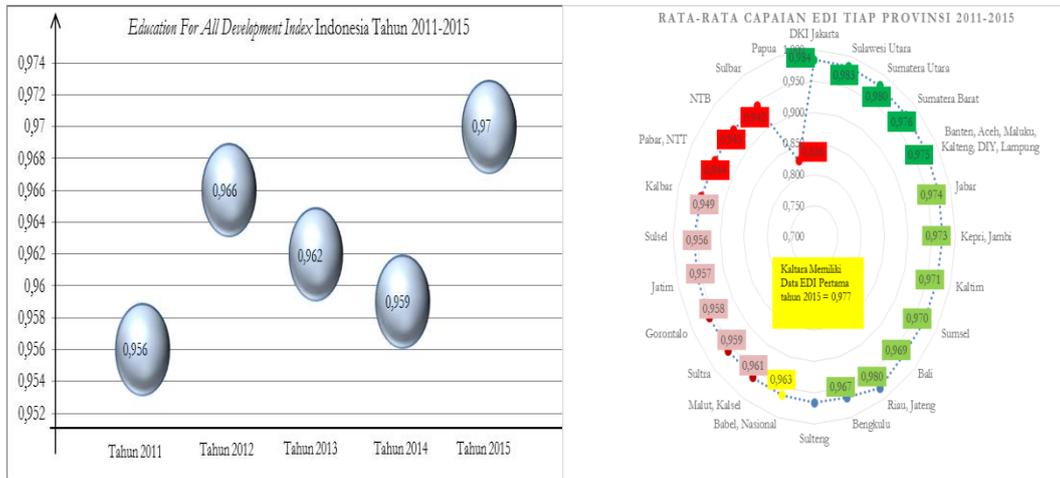
METODE

Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa hasil Laporan EDI 34 Provinsi, dan Laporan PDSPK dan hasil publikasi yang relevan dengan kajian berbasis online, dengan tahapan review kepustakaan, analisis laporan-laporan, melakukan dialog dengan para akademisi, praktisi, dan pihak pemilik program EDI dalam hal ini stakeholders di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas Jakarta. Data hasil kajian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan *Education For All* tahun 2011-2015 pada 34 provinsi di Indonesia, maka

perolehan *Education For All Development Index* Indonesia ditunjukkan seperti gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Capaian EDI Indonesia, 2011-2015

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata capaian EDI sejak tahun 2011-2015 sebesar 0,963, dengan tren perkembangan yang tinggi dan konstan dalam empat tahun terakhir dimana angka EDI tahun 2011 sebesar 0,956 meningkat menjadi 0,966 ditahun 2012, bahkan tahun 2013-2014 terjadi penurunan indeks sebesar 0,007 point hampir mendekati capaian EDI tahun 2011. Akan tetapi pada tahun 2015 capaian EDI mengalami peningkatan kembali menjadi 0,970.

Tingginya capaian EDI dalam 5 tahun tersebut memberikan warna bahwa program yang diselenggarakan oleh Kemdikbud umumnya telah berjalan dengan baik, khususnya pada 6 komponen program layanan yang dijadikan tolak ukur EDI pun berhasil.

Adapun 5 provinsi dengan capaian EDI tertinggi masing-masing provinsi DKI Jakarta (0,984), Sulawesi Utara (0,983), Sumatera Utara (0,980), Sumatera Barat (0,976) dan Banten, Nangro Aceh Darussalam, Maluku, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lampung (0,975), sedangkan 5 provinsi dengan capaian EDI terendah masing-masing provinsi Papua (0,826), Sulawesi Barat (0,942), Nusa Tenggara Barat (0,943),

Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (0,944) dan Kalimantan Barat (0,949).

Polarisasi data EDI tersebut memberikan gambaran bahwa capaian EDI untuk Indonesia bagian Barat (provinsi pulau Sumatera dan Jawa) dan Indonesia bagian Tengah (provinsi di pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) memiliki rata-rata EDI yang tinggi yakni masing-masing 0,973 dan 0,962, sedangkan Indonesia bagian Timur seperti provinsi di pulau Maluku, NTT, dan Papua dengan rata-rata EDI 0,927.

Capaian EDI Nasional tahun 2011-2015 di atas, merupakan gabungan dari perolehan indikator EDI seperti APM usia 7-12 Tahun (*Primary Net Enrolment Ratio*), AMH Dewasa (*Adult Literacy*), Indeks Spesifik Gender (*Gender Specific Index*), dan AB (Angka Bertahan) sampai tingkat 5 (*Survival Rate to Grade 5*), seperti pembahasan berikut:

1. APM Usia 7-12 Tahun (*Primary Net Enrolment Ratio*)

Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun merupakan salah satu variabel dijadikan sebagai indikator pengukuran EDI. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar dibagi

menjadi dua kelompok umur, yaitu 7 – 12 tahun mewakili usia sekolah SD, 13 – 15 tahun mewakili usia sekolah SLTP. APM yang merupakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Rata-rata perkembangan APM usia 7-12 tahun sejak tahun 2011-2015 sebesar 0,973 dengan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2011-2013, akan tetapi pada tahun 2014, mengalami penurunan angka indeks sebesar 0,021. Pada tahun 2014, capaian angka indeks nasional sebesar 0,953, dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi 0,980. Pada tahun 2015 terdapat 14 provinsi dengan capaian angka indeks APM usia 7-12 tahun sempurna (indeks 1) yakni provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Bali, dan provinsi Papua Barat, sedangkan provinsi dengan capaian perkembangan APM usia 7-12 terendah yakni provinsi Papua dengan capaian 0,72.

Tingginya angka partisipasi murni (APM) usia 7-12 tahun dalam 5 tahun terakhir ini salah satu faktor penyebabnya adalah dengan adanya Program Indonesia Pintar, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang merata sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah anak usia 6-21 tahun melalui mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan kepada peserta didik di satuan pendidikan. Merujuk dari instruksi presiden tersebut, pemerintah serius untuk meningkatkan angka partisipasi murni sekolah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor: 750/C/KL/2015 tanggal 2 Maret 2015, perihal Persiapan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015.

2. AMH Dewasa (*Adult Literacy*)

Rata-rata Angka Melek Huruf penduduk usia 15 Tahun keatas (AMH15+) Nasional pada tahun 2011-2015 sebesar 0,96. Capaian yang relatif konstan selama 5 tahun ini memberikan sumbangsih secara konstan juga terhadap EDI. Misalkan saja, capaian angka indeks Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,002 angka indeks. Peningkatan ini tidak begitu signifikan bahkan capaian AMH15+ tertinggi secara nasional terjadi ditahun 2014 sebesar 0,968, provinsi dengan capaian AMH15+ tertinggi dicapai provinsi Sulawesi Utara dengan indeks 0,995, sedangkan provinsi dengan AMH15+ terendah adalah provinsi Papua dengan indeks capaian sebesar 0,714 tahun 2015.

3. Indeks Spesifik Gender (*Gender Specific Index*)

Indeks Spesifik Gender (ISG) merupakan indikator komposit dari angka partisipasi kasar jenjang SD/MI dan SMP/MTs serta angka melek huruf dengan mempertimbangkan jenis kelamin. Rata-rata capaian ISG nasional tahun 2011-2015 sebesar 0,966, dengan capaian ISG tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan angka indeks sebesar 0,976, dan terendah tahun 2011 yakni 0,960. Dalam kurung waktu 5 tahun terakhir provinsi DKI Jakarta dengan capaian ISG tertinggi yakni 0,965 dan Papua dengan capaian ISG terendah yakni 0,913.

4. Angka Bertahansampai tingkat 5 (*Survival Rate to Grade 5*).

Rata-rata angka bertahan sampai kelas 5 SD/MI nasional sejak tahun 2011-2015 sebesar 0,954, dengan capaian tertinggi tahun 2015 sebesar 0,97 dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,933. Kenaikan sebesar 0,037 dalam kurung waktu 5 tahun tersebut menandakan bahwa angka bertahan sampai tingkat kelas 5 SD secara nasional relatif kecil, dengan kata

lain, setiap tahun anak yang mengulang relatif kecil.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengukuran EDI tersebut, sangat jelas bahwa pelaksanaan program pendidikan untuk semua (PUS) nasional dalam kurung waktu 5 tahun terakhir berhasil dan tuntas. Prestasi tersebut dapat dijelaskan dalam 6 komponen berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar usia 3-6 tahun sampai tahun 2015 mencapai 70,1%. Tingginya capaian APK ini sebagai dampak dari ketuntasan program satu desa satu PAUD. Program yang diluncurkan tahun 2014 ini bertujuan untuk perluasan akses pendidikan. Sebagai contoh kasus sampai tahun 2015 sebanyak 72,29% desa telah memiliki PAUD dan masih ada 27,71% dari 80.476 desa yang belum memiliki PAUD.

Tantangan yang dihadapi dengan ketidakmerataan layanan PAUD tersebut terjadi karena masih ditemukan data tentang: (1) Persoalan disparitas layanan PAUD yang tinggi hal ini terjadi ketimpangan layanan, kualitas, dan sebaran kuantitas paud antara yang berada di desa maupun di kota masih tinggi, (2) Kualitas guru PAUD yang masih rendah.

Hal ini terjadi hampir disetiap lembaga, bahwa ditemukan guru-guru yang berkualifikasi SMA dan belum mengikuti pendidikan dasar ke-PAUD-an, (3) Daerah dengan kategori Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) belum memiliki PAUD, hal ini berdasarkan hasil pengamatan tahun 2015 bahwa masih terdapat lebih kurang 22.000 desa yang berada di daerah 3T belum memiliki PAUD.

Ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena sebagai daerah garda terdepan Indonesia harus menjadi prioritas dalam pengembangan program di tahun akan datang. (4) tantangan yang terakhir adalah belum adanya kebijakan wajib PAUD, oleh

sebab itu mulai tahun 2016, pemerintah mulai memikirkan kebijakan wajib PAUD.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya APK PAUD adalah tingginya perhatian satuan untuk mengajukan akreditasi sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sosial satuan PAUD dalam menjaga dan mengendalikan mutu layanan. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah lembaga PAUD yang siap diakreditasi sebanyak 36.559 lembaga. Akreditasi merupakan suatu standar penilaian minimal berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD dalam memberikan layanan pendidikan masyarakat.

2. Program Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pondasi lanjutan kedua setelah pendidikan anak usia dini dengan sasaran anak usia 7-15 tahun. Pada tahun 2015, APM anak usia 7-15 tahun 98,15% dan APK anak usia 7-15 tahun 108,67% (PDSPK, 2014/2015). Tingginya capaian APM dan APK anak usia 7-12 tahun tidak terlepas dari penuntasan program dasar sembilan tahun dan diperkuat program wajib belajar 12 tahun.

Kedua program pemerintah dikhususkan pada masyarakat kurang mampu, akan tetapi setelah terbitnya program indonesia pintar maka berlaku secara umum bagi anak-anak usia sekolah di Indonesia. Dengan adanya bantuan pemerintah tersebut tidak akan ada lagi yang namanya anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena alasan tidak mempunyai cukup biaya.

Selain melalui pendidikan formal, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemerataan pendidikan dasar melalui optimalisasi peran pendidikan masyarakat dijalur nonformal dalam bentuk PKBM, SKB, TBM, Rumpin, dan BPKB, layanan yang ditawarkan berupa pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah

penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 orang, 3,7% (5,9 juta orang) dari populasi penduduk tersebut termasuk kategori tuna aksara, anak usia sekolah tidak sekolah 4.406.858 orang (Data hasil olah PDSP (2014), dan BPS (2014)). Relatif tingginya angka tuna aksara dan tidak sekolah menjadi salah satu faktor lahirnya program Indonesia Pintar untuk menyasar anak Indonesia lebih kurang 10 juta baik yang tuna aksara dan tidak sekolah.

Kecenderungan positif program Paket A dan Paket B tergambar jumlah warga belajar yang berperan mendorong meningkatnya APK pendidikan dasar. Jumlah warga belajar Paket A tahun 2009 sebanyak 133.873, tahun 2010 sebanyak 149.476, tahun 2011 sebanyak 151.908, tahun 2012 sebanyak 75.984, tahun 2013 sebanyak 69.905, tahun 2014 sebanyak 44.040, dan tahun 2015 sebanyak 12.640 orang.

Sedangkan warga belajar Paket B tahun 2009 sebanyak 487.541, tahun 2010 sebanyak 537.851, tahun 2011 sebanyak 353.805, tahun 2012 sebanyak 225.766, tahun 2013 sebanyak 142.004, tahun 2014 sebanyak 156.030, dan tahun 2015 sebanyak 95.750 orang. Kecenderungan positif program Paket A dan Paket B tergambar jumlah warga belajar yang berperan mendorong meningkatnya APK pendidikan dasar.

3. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Program pendidikan kecakapan hidup merupakan program strategis pemerintah dengan tujuan untuk memutus mata rantai pengangguran penduduk. Berdasarkan data tahun 2015 jumlah penduduk yang menganggur sekitar 7.150.000 orang (TNP2K: 2014). Melalui program pendidikan kecakapan hidup, masyarakat diberi pelatihan dan pendampingan keterampilan agar terbentuk unit usaha masyarakat, baik skala mandiri, maupun berkelompok.

Adapun keberhasilan pemerintah dalam program ini dapat diukur dari tingkat pendidikan angkatan kerja, meskipun lambat laun terus

meningkat, secara relatif masih rendah. Pada tahun 2013 Lebih dari 18,12% angkatan kerja hanya berpendidikan lulus Sekolah Dasar, sedangkan yang berkualifikasi lulusan SMA/SMK sekitar 26,06% (BPS: 2013).

Sebagian besar merupakan akibat dari keterbatasan akses ke pendidikan menengah dan pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tantangannya terletak pada penyediaan peluang pembelajaran sepanjang hayat bagi angkatan kerja yang perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mereka seiring dengan tantangan dan tuntutan dunia kerja.

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) mengidentifikasi rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang tidak berorientasi keterampilan menjadi faktor utama rendahnya daya saing dan kinerja. Selain itu hambatan utama datang dari kurangnya peluang peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja.

Begitu juga halnya dengan kurang tersedianya peluang kursus atau pelatihan dan pendidikan menengah di pedesaan menjadi hambatan program diversifikasi ekonomi dan produktivitas angkatan kerja non pertanian. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penghasilan angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan yang miskin adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan melalui kursus-kursus dan pelatihan yang sesuai dengan potensi pedesaan sehingga dapat bekerja atau berusaha untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat.

4. Program Pendidikan Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan merupakan antiseptik dari virus buta aksara nasional. Sejak pemerintahan orde baru, buta aksara menjadi momok menakutkan dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Melalui Program Pendidikan Keaksaraan angka buta aksara secara nasional sampai tahun

2015 menjadi 3,7% atau setara 5,9 juta orang (PDSP, 2014).

Sebagaimana target kesepakatan Dakar tahun 2000 tentang *Education for All (EFA)* dan *Komitmen Millenium Development Goals (MDGs)*. Pada tujuan 4 program EFA dirumuskan target pendidikan keaksaraan yaitu tercapainya 0,25.% kenaikan angka keaksaraan orang dewasa, terutama perempuan, dan kesetaraan akses pendidikan dasar dan pendidikan sepanjang hayat bagi mereka.

Sementara itu, dalam Target MDG's ditetapkan pada Tujuan 2: Mencapai pendidikan dasar untuk semua, yang kemudian pada Target 3 dirumuskan yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Dengan pemenuhan pendidikan dasar bagi semua warga maka diasumsikan bahwa jumlah penduduk tuna aksara akan berkurang bahkan tidak ada. Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa, dilakukan melalui penurunan jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa telah berhasil dicapai, dari tahun 2010 dengan target 5% tercapai 4,75%; tahun 2011 dengan target 4,80% tercapai 4,43%; tahun 2012 dengan target 4,23% tercapai 4,21%; tahun 2013 dengan target 4,03% tercapai 4,03%; tahun 2014 dengan target 3,83% tercapai 3,76%.

Indikator keberhasilan ini sebagai upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.

Penduduk tuna aksara yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraan dasar tersebut mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Penurunan angka tuna aksara tahun 2014 merupakan kumulatif capaian tahun 2013 sebesar 4,03% atau sebanyak 6.165.406 orang, ditambah

capaian tahun 2014 sebanyak 157.920 orang, sehingga jumlah penduduk tuna aksara menurun menjadi 6.007.486 orang atau 3,76%.

Penurunan tuna aksara selama kurun waktu 2004-2015 mencapai hasil yang menggembirakan, namun dalam penurunan tuna aksara tersebut masih terdapat 2 provinsi yang angka tuna aksara berada di atas 10% yaitu Papua 30,93% dan NTB 10,92%. Sedangkan 9 provinsi angka tuna aksara masih di atas 4% yaitu: Sulawesi Barat 7,96%, NTT 7,21%, Sulawesi selatan 7,21%, Kalimantan Barat 5,76%, Bali 5,33%, Jawa Timur 5,92%, Sulawesi Tenggara 4,6%, Papua Barat 4,92%, dan Jawa Tengah 4,52%.

5. Program Pengarusutamaan Gender

Pendidikan merupakan katalis yang tak tertandingi untuk perubahan. Pendidikan memberdayakan anak perempuan dan perempuan untuk mengambil alih penuh kehidupan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat dan negara, baik sebagai penerima manfaat maupun agen perubahan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada tahun 2030.

Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan merupakan strategi untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang adil dan setara dengan memperhatikan masalah, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, baik secara sosiokultural, geografis dan kondisi-kondisi lainnya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan gender pada seluruh tahapan dan aspek pembangunan pendidikan mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi pembangunan pendidikan.

Akses terhadap pendidikan berbasis kesetaraan dan keadilan gender telah berkembang secara bertahap semenjak keluarnya kebijakan tentang

pengarusutamaan gender tahun 2001. Kesenjangan gender di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah tingkat atas telah menurun secara keseluruhan, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Partisipasi Siswa pada PAUD mulai dirasakan manfaatnya bagi para orangtua, terutama di daerah. Peningkatan angka partisipasi kasar terus membaik. Jika dilihat dalam perspektif gender, jumlah peserta didik PAUD laki-laki dan perempuan seimbang. Dengan demikian, perbedaan gender (*gender parity*) dengan indeks perbedaan gender (*gender parity index*) yaitu 1,00 yang berarti sudah seimbang.

Perkembangan ISG sejak tahun 2011 berada pada angka 96% sampai tahun 2015 menjadi 96,5%. Ini berarti dalam kurung waktu 5 tahun tren ISG sebesar 0,05%. Pengarusutamaan gender sangat penting diperhatikan, utamanya dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Potensi sumber daya manusia yang berkualitas itu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa apabila laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam mengikuti jenjang pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi, maka Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas.

Kondisi ini akan berdampak terhadap kemudahan dalam pembangunan yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara sebagaimana telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, terdapat dua komponen yang berpengaruh yakni program dan guru. Program merupakan suatu perangkat yang terencana yang akan dicapai dalam

waktu tertentu. Dalam hal ini misalkan, untuk mendapatkan mutu pendidikan setiap program harus memenuhi standar minimal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Terdapat 8 standar pendidikan yang harus disusun dan ditetapkan untuk diimplementasikan pada setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal.

Selanjutnya, dalam rangka mengukur pemenuhan standar nasional pendidikan pada setiap satuan, maka dibentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yaitu BAN Pendidikan Tinggi (BAN PT), BAN Sekolah/Madrasah (BAN S/M), dan BAN Pendidikan Nonformal (BAN PNF).

Setiap program yang telah terakreditasi secara linear berdampak pada peningkatan mutu layanannya. Mutu layanan baik maka berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat secara kuantitas menambah jumlah peminat program tersebut. Oleh sebab itu, setiap periode tertentu suatu program perlu diperbaharui mutu layanannya melalui sistem akreditasi.

Komponen terpenting lainnya adalah guru. Untuk itu, dikeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peran dan kedudukan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya, rasio guru dan siswa di Indonesia sudah ideal yaitu rata-rata untuk setiap 15-19 orang siswa di lembaga pendidikan formal-persekolahan dapat ditangani oleh seorang guru.

Sementara itu, untuk pendidikan nonformal (Paket A, B, Pemberantasan Tuna Aksara), satu orang guru/tutor rata-rata melayani 12-17 orang. Kualifikasi PTK PAUD sampai dengan tahun 2013 sebanyak 352.464 yang terdiri dari formal sebanyak 267.576 dan nonformal sebanyak 84.888. Dari jumlah tersebut yang berkualifikasi S1 sebanyak 65.707 dan sisa yang belum terlayani untuk S1 sebanyak 286.767, sementara jumlah

guru yang bersertifikat sampai tahun 2014 sebanyak 1.389.334.

Upaya mengatasi itu permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu: (1) Syarat menjadi guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD atau S1 Psikologi, (2) Apabila guru PAUD berasal dari S1 diluar S1 PAUD dan S1 Psikologi, wajib mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dasar, lanjutan dan dibuktikan dengan sertifikat tanda kelulusan, (3) Peningkatan kualifikasi guru yang dilakukan oleh universitas yang telah terakreditasi; (4) pengenalan sistem pendistribusian pendidikan guru yang inovatif, (kluster sekolah dan dukungan kabupaten/kota), dan (5) pemberian insentif berbasis kinerja bagi para guru terkait dengan kualifikasi profesional serta keinginan bekerja di daerah-daerah terpencil.

SIMPULAN

Berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian EDI tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,963. Capaian EDI tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,970, dan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,956.
2. Rata-rata indeks APM SD/MI Indonesia sampai tahun 2015 adalah sebesar 0.973. Sampai tahun 2015, terdapat 14 provinsi dengan capaian angka indeks APM usia 7-12 tahun sempurna (indeks 1) yakni provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Bali, dan provinsi Papua Barat, sedangkan provinsi dengan capaian perkembangan APM usia 7-12 terendah yakni provinsi Papua dengan capaian 0,72.

Merujuk pada perolehan nilai APM SD Indonesia, dapat dikatakan bahwa penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah atau sudah menamatkan sekolah sudah baik. Hal ini juga dapat diartikan bahwa akses dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan

pendidikan di sekolah dasar cukup besar. Kondisi yang baik ini harus dapat dipertahankan agar program wajib belajar 12 tahun terus berjalan dengan baik melalui penguatan dan perluasan akses Program Indonesia Pintar;

3. Rata-rata Angka Melek Huruf Usia 15 tahun keatas (AMH15+) tahun 2011-2015 adalah sebesar 0.96. Capaian yang relatif konstan selama 5 tahun ini memberikan sumbangsih secara konstan juga terhadap EDI. Misalkan saja, capaian angka indeks Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,002 angka indeks. Peningkatan ini tidak begitu signifikan bahkan capaian AMH15+ tertinggi secara nasional terjadi ditahun 2014 sebesar 0,968, provinsi dengan capaian AMH15+ tertinggi dicapai provinsi Sulawesi Utara dengan indeks 0,995, sedangkan provinsi dengan AMH15+ terendah adalah provinsi Papua dengan indeks capaian sebesar 0,714 tahun 2015.
4. Rata-rata ISG nasional sejak tahun 2011-2015 telah mencapai 0,966. dengan capaian ISG tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan angka indeks sebesar 0,976, dan terendah tahun 2011 yakni 0,960. Dalam kurung waktu 5 tahun terakhir provinsi DKI Jakarta dengan capaian ISG tertinggi yakni 0,965 dan Papua dengan capaian ISG terendah yakni 0,913;
5. Rata-rata Angka Bertahan Kelas 5 SD nasional tahun 2011-2015 telah mencapai 0.954. dengan capaian tertinggi tahun 2015 sebesar 0,97 dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,933. Kenaikan sebesar 0,037 dalam kurung waktu 5 tahun tersebut menandakan bahwa angka bertahan sampai tingkat kelas 5 SD secara nasional relatif kecil, dengan kata lain, setiap tahun anak yang mengulang relatif kecil.

Rekomendasi

Sistem pendataan yang dikelola secara terpusat sangat membantu dalam perumusan dan penyusunan data EDI setiap tahun. Sehingga koordinasi dan sosialisasi

sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data EDI yang akurat dan komprehensif.

Mengingat tahun 2015, akhir dari program pendidikan untuk semua secara global, maka untuk meningkatkan angka capaian *EFA Development Index* perlu dibuatkan standar yang dapat menjamin akuntabilitas pendataan EDI. Merujuk pada prestasi EDI sampai tahun 2015 yang tinggi.

Walaupun program pendidikan untuk semua berakhir, diharapkan program-program yang menunjang program anak usia dini, program pendidikan dasar, program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan keaksaraan, program pengarusutamaan gender dan program peningkatan mutu pendidikan terus ditingkatkan dengan mendesain dalam bentuk yang inovatif kekinian baik mulai dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Pemerintah Kabupaten/Kota, sampai ke satuan pendidikan sebagai garda terdepan yang melayani PAUD dan Dikmas.

Selain itu juga, penguatan sistem tata kelola, manajemen program, sampai evaluasi efektifitas pelaksanaan program PAUD dan Dikmas direkomendasikan untuk dapat ditingkatkan kembali pada aspek mutu dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggungjawab sosial pemerintah, masyarakat dan penyelenggara PAUD dan Dikmas di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ditjen PAUDNI. (2010). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dini, Nonformal dan Informal*. Jakarta: Ditjen PAUDNI
- _____. (2014). *Laporan Education For All Development Index 2011-2014*. Jakarta: Ditjen PAUDNI
- _____. (2014). *Laporan Pendidikan Untuk Semua Tahun 2014*. Jakarta: Ditjen PAUDNI.
- _____. (2015). *Evaluasi Capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dini, Nonformal dan Informal Tahun 2010-2014*. Jakarta: Ditjen PAUDNI.
- Ditjen PAUD dan Dikmas. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2015*. Jakarta: Ditjen PAUD dan Dikmas.
- Pusat Data Statistik Pendidikan. (2014). *Proyeksi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Pusat Data Statistik Pendidikan.
- UNESCO. (2000). *Laporan Deklarasi Dakar Tentang Pendidikan Untuk Semua: Memenuhi Komitmen Kita Bersama*. Dakar: UNESCO.